

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung B Lantai I
Jalan Wolter Monginsidi Telp./Fax (0541) 662295 Kode Pos 7511
TENGGARONG

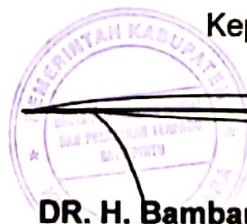
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat menetapkan Rencana Strategi Tahun 2016-2021. Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan Visi“ ***Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan***” memberikan gambaran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam pembangunan nasional lima tahun kedepan.

Berpedoman pada Rencana Strateis ini, seluruh aparaturnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat diukur dengan mudah.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini, semoga kerjasama dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Kepala Dinas,



DR. H. Bambang Arwanto, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 1974011 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii-iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika	4
 BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP.....	6
2.2. Sumber Daya DPMPTSP.....	8
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP	9
2.4. Tantangan, Peluang Dan Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.....	12
 BAB. III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP	15
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	16
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /	17
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	18
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	22
 BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP	23

BAB. V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	24
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	25
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
BAB. VIII	P E N U T U P	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peransangat penting dan strategis dalam menentukan arah ke depan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih selama satu periode yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016–2021, kemudian menerjemahkannya secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan program prioritas antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
- b. Pengembangan Sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan

- c. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- d. Pengendalian Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka dianggap perlu dilakukan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
 14. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama kurun waktu lima tahun yakni tahun 2016 – 2021 yang mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar bagi penyusunan cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perencanaan strategis ini adalah untuk menentukan strategi arah kebijakan, agenda, dan sasaran melalui program pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

BAB. II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSP

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya DPMPTSP, kinerja pelayanan DPMPTSP, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam 5 (lima) tahun mendatang

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANANDPMPTSP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

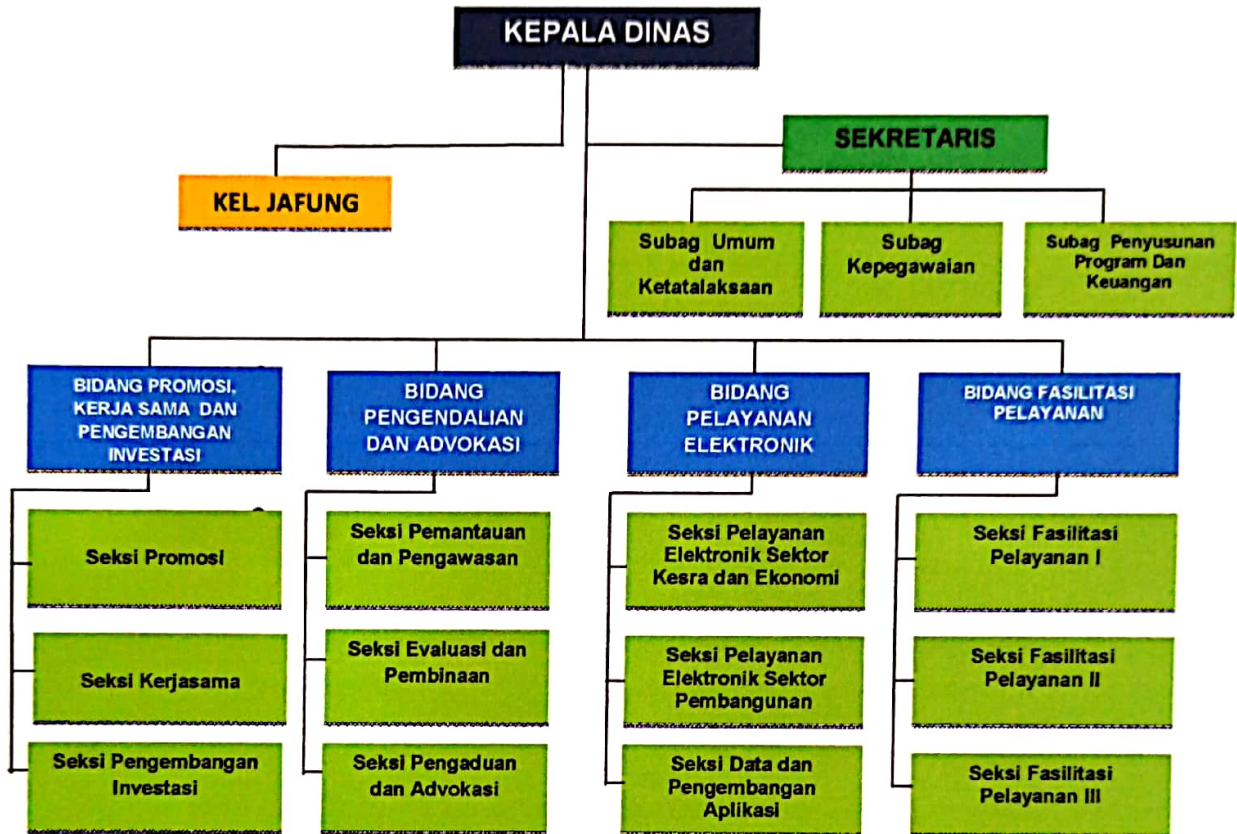
2.1.3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Promosi dan Kerjasama dan Pengembangan Investasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Kerjasama; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Investasi.
- d. Bidang Pengendalian dan Advokasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pembinaan; dan
 - 3. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- e. Bidang Fasilitas Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitas Pelayanan I ;
 - 2. Seksi Fasilitas Pelayanan II; dan
 - 3. Seksi Fasilitas Pelayanan III.
- f. Bidang Pelayanan Elektronik membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Elektronik Sektor Kesra dan Ekonomi;
 - 2. Seksi Pelayanan Elektronik Sektor Pembangunan; dan
 - 3. Seksi Data dan Pengembangan Aplikasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2.2. Sumber Daya DPMPTSP

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menjalankan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebanyak 98 orang, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Juru Muda	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk.I	-	-	-	-	-	-
	Juru	-	-	-	-	-	-
	Juru Tk. I	-	-	-	-	-	-
2	Pengatur Muda	1	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tk.I	8	-	-	-	-	8
	Pengatur	15	-	-	-	-	15
	Pengatur Tk.I	4	1	-	-	-	5
3	Penata Muda	4	1	9	-	-	14
	Penata Muda Tk.I	1	-	9	2	-	12
	Penata	-	1	19	2	-	22
	Penata Tk.I	1	1	10	1	-	13
4	Pembina	-	-	-	5	-	5
	Pembina Tk.I	-	-	1	1	-	2
	Pembina Utama Muda	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama	-	-	-	-	-	-
Jumlah		34	4	48	11	1	98

Sumber : DPMPTSP 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dapat dilihat pada buku inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan dua urusan pemerintahan meliputi pelayanan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				-	-	-	-	68	-	-	-	64,64	-	-	-	-	-	
2	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN/PMA)				-	-	-	1,53%	1,54%	-	-	-	-	9,40%	-	-	-	-	
3	Jumlah Investor Baru (PMDN/PMA)				-	-	-	38	40	-	-	-	-	112	-	-	-	-	
4	Jumlah/Target Penanaman Modal PMDN/PMA (Tribun Rupiah)				-	-	-	3,10	3,14	-	-	-	-	3,91	-	-	-	-	
5	Realisasi Penanaman Modal (PMDN/PMA)				-	-	-	85%	87%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	-	-	75	80	-	-	-	86,55	86,61	-	-	-	-	
7	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan (jam)				-	-	-	1,12	1,08	-	-	-	0,82	0,82	-	-	-	-	

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2018 (12)	2014 (13)	2015 (14)	2016 (15)	2017 (16)	2018 (17)	2018 (18)	Realisasi (19)
I	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	10.670.216,181,39	9.201.715.439,00	-	-	-	9.721.328.643,00	8.731.789.008,00	-	-	-	91,10	94,89	-	-
II	Belanja Langsung				2.802.711.439,46	4.201.473.080,00				2.272.268.445,00	3.168.858.232,00				81,07	75,42		
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	-	-	-	1.112.742.012,03	1.465.944.080,00	-	-	-	1.057.295.400,00	1.340.601.462,00	-	-	-	95,01	91,44	-	-
2	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	220.690.565,00	200.000.000,00	-	-	-	212.889.545,00	157.983.000,00	-	-	-	96,46	78,99	-	-
3	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	130.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	128.970.200,00	43.240.800,00	-	-	-	99,20	86,48	-	-
4	Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	455.529.000,00	635.529.000,00	-	-	-	49.997.600,00	628.248.100,00	-	-	-	10,97	98,85	-	-
5	Prog. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	328.014.300,00	225.000.000,00	-	-	-	313.755.600,00	195.415.875,00	-	-	-	95,65	86,85	-	-
6	Prog. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	187.282.600,00	125.000.000,00	-	-	-	178.507.200,00	91.049.200,00	-	-	-	95,31	72,83	-	-
7	Prog. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengemb. Sistem Pelayanan	-	-	-	220.203.630,43	1.250.000.000,00	-	-	-	219.999.900,00	591.877.319,00	-	-	-	99,90	47,35	-	-
8	Prog. Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan Perizinan	-	-	-	148.668.000,00	250.000.000,00	-	-	-	110.853.000,00	120.442.476,00	-	-	-	74,56	48,17	-	-

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara

2.4. Tantangan, Peluang Dan Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

2.4.1. Tantangan

Di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia optimis investasi akan tetap tumbuh. Dalam situasi makro ekonomi global saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik masuknya investor yang sedang mencari negara-negara "*emergingmarket*" bagi penanaman modalnya.

Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Penerapan *Sustainable Development Goals* oleh pemerintah Indonesia perlu memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah.
2. Dinamika perubahan regulasi kebijaksanaan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat.
3. Tuntutan perwujudan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih 2016-2021 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat dan transparan.
5. Persaingan Global dibidang Investasi.
6. Adanya persaingan Pelayanan Investasi dengan daerah lain.
7. *Goodgovernance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.
8. Kecendrungan penurunan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan.

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.5.2. Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain :

1. Penataan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
2. Dukungan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Perkembangan Teknologi yang semakin pesat terhadap pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya.
5. Minat Investor untuk berinvestasi sangat tinggi.
6. Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat.
7. Dukungan Kepala Daerah memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.
8. Beberapa program yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik.

2.5.3. Pengembangan Pelayanan

Dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan Gerbang Raja sebagai Grand Strategy pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan untuk mendorong Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara **yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan** melalui pemerintah daerah yang handal, professional dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Gerbang Raja 2016 – 2021, di tuntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah khususnya kualitas pelayanan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait dengan hal tersebut arah pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara⁵ (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Penyusunan regulasi untuk mendukung daya tarik investasi dan pelayanan terpadu.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, melalui perbaikan pelayanan terpadu satu pintu menjadi lebih baik.
3. Peningkatan penanaman modal yang mengarah pada value added pada sektor pertambangan dan penggalian serta pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
4. Penataan data peluang investasi yang akurat dan mutakhir.
5. Peningkatan penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan UMK dan Koperasi.
6. Peningkatan sumber daya aparatur pelayanan penanaman modal berbasis Teknologi dan Informasi.
7. Sumber daya aparatur yang ada diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan disamping peningkatan wawasan sumber daya aparatur yang perlu mendapat perhatian serius terutama di bidang teknologi informasi di bidang pelayanan Perizinan.
8. Dukungan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang berbasis di bidang Pelayanan Perizinan satu pintu.
9. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlunya untuk memiliki dokumen perizinan;

BAB III

PERMASALAH DAN ISU ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari peranan swasta yang menggerakkan perekonomian melalui penanaman modal. Daya tarik investasi suatu daerah akan tinggi salah satunya jika terdapat kemudahan dalam pelayanan perizinan. Dengan pelayanan perizinan yang efisien dan cepat maka akan terjadi percepatan penanaman modal pada daerah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan tentu dibutuhkan pegawai yang profesional, standar prosedur yang jelas dan biaya pelayanan yang pasti. Menjawab tantangan untuk mencapai pelayanan perizinan yang efisien, efektif dan kepastian biaya, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Dalam hal ini perlu ada pembenahan kualitas dan motivasi aparatur pelaksanaan pelayanan tersebut. Selanjutnya perlu adanya kepastian standar pelayanan yang berkualitas, serta penetapan target tujuan organisasi yang jelas dan terukur. Sebagai identifikasi awal terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel sebagai berikut :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pelayanan perizinan	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Belum terintegrasinya sistem dan prosedur perizinan
			Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur perizinan lintas sektoral
			Belum optimalnya Koordinasi secara berkala lintas sektoral
2	Belum optimalnya pencapaian sasaran investasi	Kurang selarasnya kerjasama terhadap minat investor	Belum optimalnya minat investor menanamkan modal
			Belum optimalnya kerjasama dengan pihak investor
			Rendahnya kesadaran pihak investor menyampaikan LKPM

3.2. Telaahan Visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara **“Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”** yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD, Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Misi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021 dalam masa kepemimpinannya adalah:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Dari ketujuh misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah misi ke satudan tiga yaitu :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM

Sasaran strategis BKPM yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas DPMPSTSP Kalimantan Timur

Sasaran strategis DPMPSTSP Kalimantan Timur yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan system pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah.
3. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013–2033 disebutkan bahwa Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Oleh sebab itu sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resources based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Mengingat tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan pembangunan ekonomi daerah yang sangat bersinggungan dengan rencana tata ruang wilayah yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun sumber daya yang potensial, karena rencana tata ruang wilayah dapat memetakan wilayah – wilayah yang bisa dan tidak bisa dimanfaatkan dengan

pertimbangan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjadi sumber daya riil dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, diketahui bahwa rekomendasi mitigasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk itu dilakukan telaahan terhadap KLHS sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
A	Kawasan Lindung		
1	Hutan Lindung	204.640	7,51
2	Cagar Alam	32.038	1,18
3	Taman Nasional	50.726	1,86
4	Taman Hutan Raya	52.603	1,93
	Total Kawasan Lindung	340.007	12,47
B	Kawasan Budidaya		
1	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK):		
	Hutan Produksi Tetap (HP) (termasuk kws hutan bakau/fungsi lindung)	787.675	28,89
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	600.000	22,01
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	56.453	2,07
	Total KBK	1.444.128	52,97
2	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)		
	Pertanian	36.448	1,34
	Perkebunan	397.404	14,58
	Pertambangan	423.765	15,54
	Permukiman	19.591	0,72
	Tubuh Air (Perikanan)	64.957	2,38
	TOTAL KBNK	942.165	34,56
	Total Kawasan Budidaya	2.386.293	87,53
	Total (Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya)	2.726.300	100,00

3.4.3. Kawasan Hutan Lindung

Dari uraian diatas, maka luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 204.640hektar, dengan sebaran wilayah kecamatan:

1. Kecamatan Kembang Janggut;
2. Kecamatan Marang Kayu;
3. Kecamatan Samboja; dan
4. Kecamatan Tabang

3.4.4. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2031, sebagaimana ditampilkan tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Kawasan Budidaya

Kawasan	Lokasi/ Luas
a. kawasan peruntukan hutan produksi;	a. Kecamatan Kembang Janggut; b. Kecamatan Kenohan; c. Kecamatan Loa Kulu; d. Kecamatan Muara Muntai; e. Kecamatan Muara Wis; dan f. Kecamatan Tabang Ket : (Total Luas 600.000 Ha dan yang telah dikonversi 56.453Ha)
b. kawasan peruntukan pertanian;	Sawah beririgasi 16.915 hektar kawasan perkebunan 397.404
c. kawasan peruntukan perikanan;	a. Untuk kawasan tangkapan air tawar dan air laut tersebar diseluruh Kecamatan (18 Kecamatan) b. Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan : 1) Marang Kayu; 2) Anggana; 3) Muara Badak; dan 4) Samboja
d. kawasan peruntukan pertambangan;	Luas 423.765 Ha
e. kawasan peruntukan industri;	a. Kecamatan Loa Kulu; b. Kecamatan Samboja; c. Kecamatan Loa Janan; d. Kecamatan Muara Badak; e. Kecamatan Kembang Janggut; f. Kecamatan Sebulu; g. Kecamatan Anggana; dan h. Kecamatan Tenggarong Seberang
f. Kawasan peruntukan pariwisata;	Terdapat diseluruh Kecamatan
g. Kawasan peruntukan permukiman; dan	a. Pemukiman Perkotaan Kurang Lebih 21.171 ha b. Pemukiman Pedesaan Kurang Lebih 45.708 Ha
h. Kawasan peruntukan lainnya.	a. Batalyon Artileri Medan (Armed) berada di Kecamatan Loa Kulu; b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0906 berada di Kecamatan Tenggarong; c. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; d. Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Tenggarong; dan e. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan

1. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara disahkan lebih dahulu sebelum RTRW Provinsi Kalimantan Timur disahkan, selanjutnya untuk mensinkronkan RTRW Provinsi dengan Kabupaten, maka RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara akan diperbaiki menyesuaikan dengan RTRW Provinsi. Tentu saja sebelum adanya penyesuaian tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengalami kesulitan meyakinkan kepada investor tentang kepastian hukum wilayah usahanya.

2. **Permasalahan Tumpang Tindih Lahan** merupakan fakta dilapangan yang selalu ditemui, peta peruntukan lahan yang berbeda antar instansi sering menjadi polemik yang mengakibatkan terjadinya konflik karena masing-masing pihak beralasan bahwa telah menggunakan peta yang benar. Kondisi ini memberikan implikasi terhadap biaya besar dan lamanya waktu yang terbuang dalam upaya penyelesaian kepastian lahan. Alternatif dan solusi di masa mendatang harus ada komitmen dan kesepakatan bersama terhadap peta lahan tunggal yang merupakan dasar dan panduan semua pihak melalui Sistem One Map One Data (SiOMOD)

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain :

1. Peningkatan kinerja kelembagaan perizinan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
3. Peningkatan konsistensi pelayanan perizinan.
4. Penyajian data serta informasi penanaman modal dan perizinan.
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas kemudian DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara tujuan jangka menengah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.

Disamping sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dapat juga menjadi instrument untuk mencapai hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh sebuah organisasi, untuk mengukur pencapaian masing – masing sasaran maka dibuatlah indikator kinerja sasaran, yang dapat digunakan untuk melihat capaian sasaran setiap tahunnya selama periode perencanaan. Sasaran yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang adalah sebagaimana disampaikan dalam dalam Tabel berikut.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	64,64	68	70	75	80
2	Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	1,53%	1,54%	1,59%	1,65%	1,68%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat	75 (Baik)	80 (Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya menjadi dasar rumusan kegiatan program prioritas.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI			
"Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"			
MISI 1			
Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penerapan dan Pemantapan Reformasi Birokrasi
MISI 3			
Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN/PMA	Percepatan Pertumbuhan dan Pengembangan Investasi	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan pada Dunia Usaha
			Peningkatan Kemitraan dengan Dunia Usaha
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Percepatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran, diuraikan pada table 5 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1.

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kategori	Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Program dan Kegiatan												Kategori Kegiatan	Lokasi	
				2017 (Rencana)				2018				2019						Kendala Utama dan Cara Mengatasinya
				RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP			
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indikator Kinerja Utama	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indikator Kinerja Utama	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indikator Kinerja Utama	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	

Rencana Strategis 2016 – 2021

	Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan	Jumlah Anggaran yang realisasi dan yang akan direalisasikan	52	250.000.000	60	325.000.000	100	454.934.999	150	990.000.000	150	1.000.000.000	512	2.979.934.999,00	Kasabang Pery Program dan Kegiatan
	Penyediaan jasa administrasi "Tersa Perawatan"	Jumlah tenaga pendukung non PNS	52	562.332.480	52	549.187.656	52	652.510.236	52	491.210.990	52	653.000.000	280	2.803.240.932,00	Kasabang Pery Program dan Kegiatan
	Penyediaan jasa perbaikan Perawatan Kery	Jumlah jasa perbaikan yang diperoleh	-	-	6	48.000.000	6	30.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	24	173.000.000,00	Kasabang Ummat
	Penyediaan Barang Logistik Kery	Jumlah jasa perbaikan dan bahan perbaiki	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	25.000.000	25	36.000.000	125	90.000.000,00	
	Penyediaan Ayo Perawat Damar	Jumlah Dokumen Ayo	-	-	-	-	-	-	1.000	250.000.000	-	-	1.000	250.000.000	
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Daftar Sarana Prasarana Perawatan Dalam Kerdas Bakt		240.303.885		200.000.000		1.830.000.000		650.000.000		650.000.000		3.873.303.946,00	Sekretaris
	Penyediaan peralatan gedung kery	Jumlah paket peralatan peralatan gedung kery	2	50.000.000	-	-	3	1.540.000.000	-	-	-	-	5	1.590.000.000,00	Kasabang Ummat
	Penyediaan perlengkapan gedung kery	Jumlah jasa perbaikan perlengkapan gedung kery	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000,00	
	Penyediaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	46	130.000.000	42	160.000.000	42	200.000.000	42	250.000.000	42	500.000.000	214	1.240.000.000,00	
	Penyediaan peralatan peralatan gedung kery	Jumlah kegiatan pemeliharaan	30	30.303.865	30	40.000.000	30	165.000.000	30	150.000.000	30	75.000.000	150	460.303.865,00	
	Penyediaan peralatan peralatan gedung kery	Jumlah kegiatan pemeliharaan	6	30.000.000	-	-	-	-	12	200.000.000	6	75.000.000	12	305.000.000,00	
	Investasi Barang Mula Damar	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	1	25.000.000	-	-	-	-	1	25.000.000,00	
	Program Penyediaan Dapin Aparatur	Persentase Penurunan pengurangan dapin	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	-	-		650.000.000,00	Sekretaris
	Penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah staf pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasabang Kepogawati
	Penyediaan Pakaian Khusus Keahlian tertentu	Jumlah staf pakaian khusus keahlian tertentu	-	-	-	-	-	-	550	550.000.000	-	-	550	550.000.000,00	
	Program Penyediaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ras-Ras Nilai Kerya SGP		130.000.000		60.000.000		300.000.000		376.000.000		600.000.000		1.465.000.000,00	Sekretaris

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara**

	Feasibility Tim Teknik Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	100	200.000.000	100	350.000.000	300	550.000.000,00		
	Monitoring Peningkatan Penerapan Sistem Integrasi Layanan (SIL) di Kec. Se. Kab. Kutai serta update Aplikasi SIL ke Kementerian Kominfo RI	Jumlah UK yang dimonitoring dan update aplikasi	-	12	575.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	575.000.000,00		
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMMA	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN/PMMA)	1,63%	8,40%	1,59%	1,65%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	Kepala DPW/TPSP	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN/PMMA	425.000.000	225.000.000	250.000.000	1.280.000.000	1.825.000.000	4.106.000.000,00	Kepala Promosi dan Kerjasama Pemertan Modal								
	Pameran Promosi Dalam Daerah, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Forum Bina	Jumlah event/pameran yang diikuti	2	350.000.000	225.000.000	250.000.000	900.000.000	1.500.000.000	14	3.225.000.000,00							
	Temu Kerjasama Petani Usaha Nasional	Jumlah dokumen	1	75.000.000	-	-	50.000.000	250.000.000	3	375.000.000,00							
	Penyusunan Perbup RUPM	Jumlah dokumen	-	-	-	-	250.000.000	-	1	250.000.000,00							
	Pemadukan Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Kab. Kutai	Jumlah dokumen	-	-	-	-	50.000.000	-	1	50.000.000,00							
	Facilitasi Kerjasama Kemitraan UMKK melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Jumlah Kerjasama Kemitraan	-	-	-	-	-	100.000.000	1	100.000.000,00							
	Forum Dialog Peningkatan Investasi	Jumlah Pertemuan	-	-	-	-	30.000.000	100.000.000	2	130.000.000,00							
	Program Peningkatan klm Investasi dan Realisasi Investasi															Kabid Pengendalian	
	Program Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Penanaman PMDN/PMMA yang telah menerima realisasi investasi sesuai Perodik (UKSPM)	200.000.000	125.000.000	200.000.000	650.000.000	1.000.000.000	2.075.000.000,00	Kabid Pengendalian Penanaman Modal								
	Monitoring Pemertan dan Peltaporan	Jumlah pemertan dan peltaporan	36	100.000.000	-	-	-	-	36	100.000.000,00							
	Pemertan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemertan dan peltaporan	-	-	-	-	-	-	50	125.000.000,00							

	Pemetaan Modal	Jumlah perusahaan diembau	-	-	-	35	50 000 000	-	35	50 000 000,00		
	Pemetaan Modal	Jumlah perusahaan diembu	-	-	-	35	50 000 000	-	35	50 000 000,00		
	Pengawasan Pemantauan Modal dan CSR	Jumlah perusahaan diembu	-	-	-	35	50 000 000	-	35	50 000 000,00		
	Renstrat dan Pengawasan Pemantauan Modal	Jumlah perusahaan diembu	-	-	-	-	-	-	100	200 000 000,00		
	Evaluasi dan Pemantauan Modal	Jumlah perusahaan diembu	-	-	-	50	100 000 000	50	100	200 000 000,00		
	Pengawasan dan Advokasi	Jumlah perusahaan diembu	-	-	-	50	100 000 000	50	100	200 000 000,00		
	Pencapaian Perusahaan yang belum memiliki Izn Privat Pemantauan Modal	Jumlah Dokumen	-	-	-	1	100 000 000	1	2	200 000 000,00		
	Bentuk, Sasaran, Penempatan LKPM dan Integrasi Program CSR	Jumlah peserta Bimtek	-	-	-	50	75 000 000	50	100	175 000 000,00		
	Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pemantauan Modal dan Program CSR	Jumlah perusahaan yang mengikuti koordinasi	-	-	-	50	75 000 000	50	100	175 000 000,00		
	Penyeleksi CSR Award dan LKPM	Jumlah penyelenggaraan	-	-	-	1	50 000 000	1	2	450 000 000,00		
	Kajian Akademik RUPM Karo Kutai Kalimantan	Jumlah dokumen	1	100 000 000	-	-	-	-	1	100 000 000,00		
			2.612.045.877,09	3.795.844.080,00	5.774.798.080,00	7.857.110.980,00	10.408.800.000,00	30.046.798.887,03				

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan uraian masing-masing bab, maka dalam penyusunan perencanaan strategis ini dapat diperoleh beberapa asumsi-asumsi, kita ketahui bersama bahwa investasi/penanaman modal adalah salah satu mesin penggerak pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bersama seluruh unsur pendukung pemerintahan lainnya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara akan siap memberikan pelayanan prima. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasinya pada kegiatan setiap tahun diharapkan akan tercipta iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif. Terwujudnya iklim investasi yang menarik dan kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat daya saing dengan daerah lain dan daya tarik tersendiri bagi investor sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi di Kalimantan Timur.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada akhir periode masa jabatan yang digambarkan pada Tabel Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja DPMPTSP Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	64,64	68	70	75	80	80
2	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN/PMA)	1,52%	1,53%	1,54%	1,59%	1,65%	1,68%	1,68%
	Jumlah Investor Baru (PMDN/PMA)	0	38	40	42	44	48	212
	Jumlah/Target Penanaman Modal PMDN/PMA (Trilyun Rupiah)	3,52	3,10	3,14	3,17	3,20	3,23	15,84
	Realisasi Penanaman Modal (PMDN/PMA)	0%	85%	87%	90%	95%	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)
	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan (jam)	0	1,12	1,08	1,04	1,00	0,97	0,97